

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
KONSERVASI PENYU DI KEPULAUAN ANAMBAS**

Oleh
Hendri Efendi
NIM. 2205040033

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam konservasi penyu di Kepulauan Anambas. Penyu, sebagai spesies yang dilindungi secara internasional dan terdaftar dalam Apendiks I CITES, menghadapi ancaman signifikan dari praktik pengambilan dan perdagangan telur ilegal, khususnya di wilayah pesisir Anambas, meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Permasalahan utama adalah belum optimalnya implementasi hukum ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengatasi kesenjangan antara hukum tertulis (*law in the books*) dan praktik di lapangan (*law in action*). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kuesioner, dan wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, mengaitkan temuan empiris dengan teori *Sociological Jurisprudence* dan *Sustainable Development Theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU Nomor 32 Tahun 2024 telah selaras dengan prinsip CITES untuk perlindungan penyu. Dari perspektif *Sociological Jurisprudence*, hukum konservasi penyu belum menjadi *living law*. Sementara itu, *Sustainable Development Theory* menunjukkan bahwa kebijakan konservasi belum mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi secara optimal. Sebagai kesimpulan, implementasi CITES dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 di Kepulauan Anambas belum berhasil secara efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap konservasi penyu, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: CITES, konservasi penyu, kesadaran hukum, Kepulauan Anambas, pembangunan berkelanjutan

**IMPLEMENTATION OF CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA IN LAW
NUMBER 32 OF 2024 AS AN EFFORT TO RAISE PUBLIC AWARENESS
OF TURTLE CONSERVATION IN THE ANAMBAS ISLANDS**

By
Hendri Efendi
NIM. 2205040033

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in Law No. 32 of 2024 and its impact on increasing public legal awareness of sea turtle conservation in the Anambas Islands. Sea turtles, as an internationally protected species listed in Appendix I of CITES, face significant threats from illegal egg collection and trade, particularly in the coastal areas of Anambas, despite Indonesia having ratified CITES and adopted it into national law. The main problem is the suboptimal implementation of this law in raising public awareness and addressing the gap between the law in the books and the law in action. This study uses an empirical normative legal method with a statute approach. Data collection was conducted through literature study, questionnaires, and interviews with the Riau Islands Province Marine and Fisheries Service. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods, linking empirical findings with Sociological Jurisprudence and Sustainable Development Theory. The results show that normatively, Law No. 32 of 2024 is in line with CITES principles for sea turtle protection. From the perspective of Sociological Jurisprudence, sea turtle conservation law has not become living law. Meanwhile, Sustainable Development Theory shows that conservation policies have not optimally integrated social and economic aspects. In conclusion, the implementation of CITES in Law No. 32 of 2024 in the Anambas Islands has not been effective in raising public legal awareness of sea turtle conservation, thus requiring a more participatory and sustainable approach.

Keywords: CITES, sea turtle conservation, legal awareness, Anambas Islands, sustainable development